IMPLEMENTASI KONTRAK PADA PELAKSANAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN AIR (PSDA) PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK

Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Prov. Sumatera Barat, sejak tahun 2014, telah terjadi pemutusan kontrak sebanyak 11 Paket Pekerjaan dan 13 Paket Pekerjaan yang menjalani penambahan waktu dengan denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemutusan kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan yang diikuti sanksi denda, apakah telah menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, mengetahui masalah apa yang dialami penyedia jasa sehingga menimbulkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan berlakunya ketentuan kontrak kritis seperti yang diatur di dalam syarat umum kontrak dan menemukan solusi apa yang bisa diambil agar penyedia jasa tidak mengalami keterlambatan pelaksanaaan pekerjaan yang berujung dikenai sanksi pemutusan kontrak atau perpanjangan waktu pelaksanaan dengan denda keterlambatan di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat pada Kontraktor kualifikasi kecil. Penelitian dilakukan bersifat kualitatif dengan penyajian deskriptif. Untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan metode triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa prosedur telah sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 untuk Pemutusan Kontrak, dan Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 untuk Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang Diikuti dengan Sanksi Denda. Permasalahan yang menimbulkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan berlakunya ketentuan kontrak kritis disebabkan oleh, faktor teknis, faktor sosial kemasyarakatan, faktor finansial, faktor cuaca dan faktor material serta upaya yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor di masa yang akan datang diantaranya adalah penyedia jasa wajib melakukan peninjauan lapangan (Aanwijzing Lapangan), Kontraktor harus mempunyai personil yang cakap serta profesional, penyedia Jasa harus mempunyai kekuatan finansial (modal) Penyedia Jasa (Kontraktor) harus bisa mensiasati pelaksanaan pekerjaan suplai material, tenaga dan peralatan tidak terganggu.

Kata Kunci : Kontrak Konstruksi, PSDA Sumbar, Pemutusan kontrak dan denda keterlambatan

UNIVERSITAS BUNG HATTA

CONTRACT IMPLEMENTATION IN THE IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION IN THE WATER MANAGEMENT DEPARTMENT (PSDA) ENVIRONMENT OF WEST SUMATERA PROVINCE

ABSTRACT

Based on data from the Water Resources Management Office (PSDA) Prov. West Sumatra, since 2014, there have been 11 contract terminations and 13 work packages which have undergone additional time with fines. This study aims to determine the contract termination process and the extension of the implementation time followed by fines, whether according to the procedures stipulated in government regulations, to find out what problems are experienced by service providers that cause delays in carrying out work that result in the enactment of critical contract provisions as regulated in General terms of the contract and find out what solutions can be taken so that service providers do not experience delays in the implementation of work which result in contract termination or extension of implementation time with late fines in the West Sumatra Province Water Resources Management Office (PSDA) for small qualified contractors. The research was conducted in a qualitative manner with descriptive presentation. To gain confidence in the correctness of the data in qualitative research, the triangulation method is used. Based on the research results, it was concluded that the procedure was in accordance with Presidential Decree No. 70 of 2012 for Contract Termination, and Article 93 of Presidential Regulation number 4 of 2015 for Extension of Work Implementation Time Followed by Sanctions of Fines. Problems that cause delays in the implementation of work that result in the enactment of critical contract provisions are due to technical factors, social factors, financial factors, weather factors and material factors as well as efforts that must be carried out by the Contractor in the future, including the service provider is obliged to conduct a field survey (Field Aanwijzing), Contractors must have competent and professional personnel, Service providers must have financial strength (capital) Service Providers (Contractors) must be able to anticipate the implementation of work on the supply of materials, labor and equipment without being disturbed.

Keywords : construction contract, West Sumatra PSDA, contract termination and late charge

UNIVERSITAS BUNG HATTA